

Melkiyanus dangga mesa

by UNITRI Press

Submission date: 05-Jul-2022 10:49PM (UTC-0400)

Submission ID: 1855770132

File name: Melkiyanus_dangga_mesa.docx (38.07K)

Word count: 822

Character count: 5811

STRATEGI KINERJA PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

MELKIYANUS DANGGA MESA

NIM. 2018110179

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG

2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rencana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Malang. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Wawancara dan laporan keuangan Kabupaten Malang dari tahun 2018-2021 yaitu data yang digunakan. Salah satu jenis analisis data yang dilakukan adalah deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi pengelolaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Malang yaitu membuat tujuan penerimaan pendapatan daerah, ekstensifikasi pendapatan, dan penguatan kelembagaan untuk membuktikan di sisi lain, pengendalian penggunaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas terhadap keuangan daerah adalah strategi pengelolaan belanja daerah Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang harus menerapkan sistem perpajakan online dan transparansi laporan keuangan.

Kata Kunci: Strategi, Belanja daerah, belanja pemerintah, dan pendapatan Daerah

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah, hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan interaksi antara pusat-pusat daerah dengan lembaga pemerintah dan komersial semuanya dipengaruhi oleh Otonomi Daerah (OTDA). Dari "pembangunan daerah" menjadi "pembangunan daerah", paradigma pembangunan telah berkembang dari sentralisasi ke desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, didirikan OTDA. Akibatnya, Indonesia telah memiliki otonomi daerah selama lebih dari sepuluh tahun. Selama ini daerah menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tujuan akhir otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa area yang berkembang ke arah yang benar, tetapi banyak area lain yang masih berjuang untuk ditingkatkan. Otonomi daerah yang memiliki berbagai pengaruh terhadap perekonomian daerah juga dapat menimbulkan masalah anggaran.

Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 menyatakan: "Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat. masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat."

Otonomi daerah memberikan daerah kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur rumahnya sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komunitas dan otoritas pada akhirnya harus meminta pertanggungjawaban otoritas besar ini.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran dan realisasi yang dilakukan secara murah, efisien, dan efektif jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka akuntabilitas publik (nilai uang). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya merupakan gambaran kualitatif tentang maksud dan tujuan pemerintah daerah, harus diciptakan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu yang harus dicapai pada tahun tertentu dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, ambisi, dan kebutuhan masyarakat, APBD harus dapat menggambarkan kebutuhan pendanaan secara jelas. Oleh karena itu, APBD harus mampu menyajikan gambaran yang akurat tentang kebutuhan dana

untuk target tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat pada tahun tertentu. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang beragam dapat memberikan manfaat dan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan umum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendukung hal tersebut.

Kinerja Pemerintah Daerah harus dilihat dengan diukur dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Banyaknya ukuran kinerja yang dicapai suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilannya. Pengelolaan anggaran (APBD) berdasarkan kinerja memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana suatu daerah dapat terus menggali potensinya untuk meningkatkan pendapatan anggaran, yang akan berdampak pada kapasitasnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan inisiatif pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

Banyak bidang perekonomian Malang, antara lain sebagai hotel, tempat hiburan, restoran, dan lain-lain, dialihkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sumber uang terpenting bagi masyarakat miskin ini bukan PAD; sebaliknya, ini adalah dana perimbangan yang didanai federal. Kontribusi PAD yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah fundamental sepanjang masa otonomi daerah masih sangat minim dibandingkan dengan dana perimbangan ini. Penulis mempertimbangkan untuk mengganti judul “Strategi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang” berdasarkan uraian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dalam situasi ini sebagai berikut mengingat hal tersebut di atas:

1. Bagaimana Strategi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Strategi Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Peneliti

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Menentukan Strategi Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Malang.
2. Mempelajari Strategi Kinerja Pengelolaan APBD Kabupaten Malang.

1.4 manfaat peneliti

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari temuan penelitian yang diantisipasi:

1. Keuntungan Teoretis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan pengetahuan teoritis kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian tambahan dengan topik menambah sumber pustaka terkini.

2. Keuntungan praktis

a. Bagi pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah berfungsi sebagai sumber informasi dan ringkasan arah dan taktik ke depan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (APBD).

b. Bagi masyarakat, temuan peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai pendapatan dengan belanja daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana publik.

3. Kebijakan

Temuan peneliti ini dapat menjadi landasan bagi mengembangkan kebijakan untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Melkiyanus dangga mesa

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com	4%
Internet Source		
2	id.123dok.com	3%
Internet Source		
3	text-id.123dok.com	3%
Internet Source		
4	123dok.com	2%
Internet Source		
5	hukum2industri.wordpress.com	2%
Internet Source		
6	pt.scribd.com	2%
Internet Source		
7	citratemplate.co.id	1%
Internet Source		
8	core.ac.uk	1%
Internet Source		
9	id.scribd.com	1%
Internet Source		

10	repository.ibs.ac.id Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.stimaimmi.ac.id Internet Source	1 %
15	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On